



Dewan Tekankan Prinsip Kehati-hatian dalam Kelola Anggaran

Dewan Tekankan Prinsip Kehati-hatian dalam Kelola Anggaran

BADAN Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pelaksanaan APBD 2025 dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa belum lama ini.

Ketua Banggar, Andi Suharmika, mengatakan pertemuan tersebut salah satunya membahas mengenai pelaksanaan Dana Insentif Daerah (DID). Hal ini merujuk pada surat edaran dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan instruksi langsung dari Presiden.

Dalam surat edaran tersebut, ditegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan barang dan jasa yang menggunakan dana DID tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya Wali Kota Makassar yang baru.

Namun, pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih memungkinkan untuk dilanjutkan. Meski demikian, Andi Suharmika memberikan masukan ke Pemkot Makassar dalam hal ini Tim TAPD terkait hal tersebut.

Salah satunya, memastikan seluruh program yang akan

berjalan di tahun 2025 dan seluruh aspek perencanaannya harus selesai sebelum ditayangkan ke dalam sistem SIRUP. Sebab DPRD Makassar menginginkan pengelolaan anggaran, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa harus menggunakan prinsip kehati-hatian.

"Kita mau menjelaskan ini prinsip kehati-hatian dalam belanja barang dan jasa. Maka dari itu kami sudah mendengarkan penjelasan dari Tim TAPD terkait pelaksanaan barang dan jasa yang menggunakan dana DID ini sesuai instruksi dari Presiden untuk tidak dilakukan pelaksanaan kegiatan sebelum adanya Wali Kota Makassar yang baru," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Makassar itu melanjutkan, semangat dari surat edaran ini adalah agar pemerintahan yang baru nantinya dapat mengatur pembelanjaan dengan berkesesuaian pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi-misi mereka.

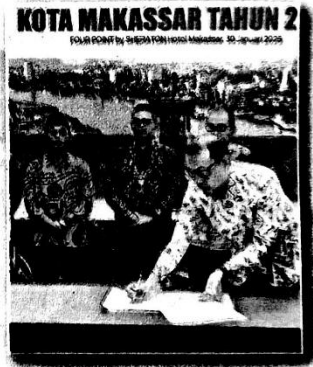
Dengan begitu, program yang dijalankan lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat. Olehnya itu pelaksanaan barang dan jasa menggunakan dana DID harus sesuai dengan in-

struksi Presiden untuk ditunda hingga pemerintahan baru terbentuk.

Andi Suharmika juga mengingatkan bahwa anggaran APBD yang bersumber dari PAD dapat digunakan karena telah disepakati bersama oleh Pemkot Makassar dan DPRD. Meski demikian, ia meminta pemerintah kota untuk tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam belanja barang dan jasa.

"APBD yang bersumber dari PAD silakan dipakai karena pemerintah kota dan DPRD sudah menyepakati APBD 2025. Tapi kami melakukan rapat koordinasi kemarin untuk bagaimana pemerintah kota melakukan prinsip kehati-hatian dalam melakukan belanja barang dan jasa," ujarnya.

Dalam rapat koordinasi yang dilakukan sebelumnya, Ketua Banggar meminta Tim TAPD untuk kembali mengadakan



rapat guna menyampaikan hasil diskusi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan menjalankan program mereka.

"Kami meminta seluruh program yang berjalan di 2025 wajib untuk menyelesaikan yang namanya aspek perencanaannya baru programnya itu berjalan. Karena kita menyesuaikan dari apa yang menjadi kebiasaan dan mengacu pada mekanisme dan aturan yang ada," tandasnya. (jtr)

